



# UMMagelang

Universitas Muhammadiyah Magelang

## PEDOMAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TERPADU (PPMT) tahun akademik 2019-2020

Form/STD/06.07-01-02

*Revitalisasi Visi Institusi  
melalui Pengabdian pada Masyarakat*

Lembaga Penelitian Pengembangan  
dan Pengabdian kepada Masyarakat



**LP3M**



**PENGESAHAN**

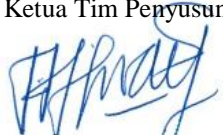


**PEDOMAN**

**PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TERPADU (PPMT)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**PM-UMM-09-01/L3**

Revisi	: 03
Tanggal	: November 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor 1
Dikendalikan oleh	: LP3M
Disetujui oleh	: Rektor

NO. DOKUMEN	: PM-UMM-09-01/L3	TANGGAL	: November 2019
NO. REVISI	: 03	NO. HAL	: -
Disiapkan Oleh : Ketua Tim Penyusun  Dr. Heni Setyowati, M.Kes NIK. 937008062	Diperiksa Oleh: Wakil Rektor 1  Dr. Purwati., MS NIP. 196008021985032003	Disahkan Oleh : Rektor  Ir. Eko Muh Widodo, MT NIP. 19650913 199103 1 002	

***Catatan: Dokumen ini milik Universitas Muhammadiyah Magelang dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Rektor***

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: : 13 Januari 2018	Hal i dari 39
-------------------------------------	--	----------------	--------------------------------------	---------------

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal ii dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat nikmat dan karunia-Nya penyusunan Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) UMMagelang tahun akademik 2019/2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman ini bertujuan agar pelaksanaan PPMT memenuhi delapan standar pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 1) standar hasil, 2) standar isi, 3) standar proses, 4) standar penilaian, 5) standar pelaksana, 6) standar prasarana dan sarana, 7) standar pengelolaan, dan 8) standar pendanaan dan pembiayaan

PPMT merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi antara dosen dengan kelompok mahasiswa. Bagi dosen, PPMT merupakan pengembangan dari PKU dan bagi kelompok mahasiswa merupakan pengembangan dari KKN. Keterpaduan kedua program sebelumnya tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Magelang, terutama dalam membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Pelaksanaan PPMT tahun akademik 2019/2020 ini masih dalam tema besar untuk revitalisasi visi institusi. Di samping untuk memajukan ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan PPMT juga untuk pengembangan karir dosen yang bersangkutan (pengembangan kapasitas), serta mempunyai dampak yang besar terhadap kualitas dan citra institusi, baik di tataran nasional maupun internasional.

Akhir kata, semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sesuai dengan tujuan penyusunannya.

Magelang, November 2019

Tim Penyusun

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal iii dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	-----------------

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN .....	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	2
BAB 2. LANDASAN PELAKSANAAN PKMT.....	3
2.1. Dasar Hukum.....	3
2.2. Tujuan Umum .....	3
2.3. Tujuan Khusus.....	3
2.4. Strategi .....	3
BAB 3. STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT .....	5
3.1. Standar Penelitian.....	5
BAB 4. BIDANG FOKUS PENGABDIAN PADA MASYARAKAT .....	9
4.1. Peningkatan Kualitas Hidup Islami [RENSTRA-01] .....	10
4.2. Pengentasan Kemiskinan [RENSTRA-02].....	11
4.3. Ekonomi kreatif berbasis wirausaha & kearifan lokal [RENSTRA-03] .....	12
4.4. Pengelolaan dan mitigasi bencana [RENSTRA-04] .....	13
4.5. Energi baru dan terbarukan [RENSTRA-05].....	13
4.6. Industri, transportasi, dan teknologi informasi [RENSTRA-06].....	14
4.7. Ketahanan dan kedaulatan pangan [RENSTRA-07].....	15
4.8. Kesehatan, penyakit tropis dan degeneratif, gizi dan obat-obatan [RENSTRA-08] .....	16
BAB 5. SKIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	18
5.1. Pendahuluan .....	18
5.2. Tujuan .....	18
5.3. Luaran .....	19
5.4. Kriteria dan Pengusulan .....	19
5.5. Sistematika Usulan PPMT.....	19
BAB 6. PENGELOLAAN PPMT .....	24
6.1. Pengajuan Proposal .....	24
6.2. Review Proposal.....	24
6.3. Pengumuman Hasil Seleksi Proposal.....	24
6.4. Kontrak.....	25
6.5. Penugasan.....	25
6.6. Pendanaan .....	25
6.7. Pelaksanaan .....	25
6.8. Monitoring dan Evaluasi .....	25
6.9. Laporan Akhir .....	26

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal iv dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

6.10. Surat Keterangan .....	26
BAB 7. PENUTUP.....	27
Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul .....	28
Lampiran 2. Halaman Pengesahan PPMT .....	29
Lampiran 3. Susunan organisasi dan pembagian tugas tim pelaksana .....	30
Lampiran 4. Daftar tanggapan dan perbaikan.....	31
Lampiran 5. Penilaian proposal PPMT.....	32

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal v dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sebagai kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil PkM selanjutnya digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Pelaksanaan PkM harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Permenristekdikti tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup standar nasional PkM meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut juga menyatakan bahwa PkM dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Yang dimaksud dengan sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan PkM; dan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Selama ini pelaksanaan PkM di Universitas Muhammadiyah Magelang berjalan terpisah, artinya 1) kelompok dosen melaksanakan kegiatan PkM sendiri dengan melibatkan atau tidak melibatkan mahasiswa (dosen lebih berperan aktif) dan 2) kelompok mahasiswa melaksanakan kegiatan PkM sendiri dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) di bawah bimbingan dosen (mahasiswa lebih berperan aktif). Kedua jenis kegiatan PkM tersebut ternyata kurang optimal dalam membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat, karena kurang keterpaduan antara dosen dengan mahasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kedua PkM itu akan dilebur menjadi satu kesatuan yang terpadu yang selanjutnya dinamakan Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT). PPMT merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan secara terpadu antara dosen dengan mahasiswa. Dosen tidak semata-mata berperan sebagai

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal 1 dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------

pembimbing dan mahasiswa hanya sebagai obyek, namun keduanya saling bekerjasama dan bermitra dalam membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Guna memperlancar dan mengoptimalkan program PkM yang baru ini, maka disusun Panduan PKMT yang akan menjadi dasar dan acuan bagi dosen maupun mahasiswa dalam pelaksanaannya.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Pedoman PKMT ini adalah memberikan panduan kepada sivitas akademika di lingkungan UMMagelang dalam melaksanakan PkM.

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal 2 dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------



## BAB 2. LANDASAN PELAKSANAAN PKMT

### 2.1. Dasar Hukum

Pelaksanaan PKMT di lingkungan UMMagelang berlandaskan pada sejumlah ketentuan pokok yang meliputi:

1. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/10/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 018/KEP/I.3/D/2014 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang

### 2.2. Tujuan Umum

Tujuan umum pembinaan dan pengembangan PkM di UMMagelang adalah menjadikan lembaga sebagai institusi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, serta mempercepat pencapaian visi institusi melalui kegiatan PkM.

### 2.3. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pembinaan dan pengembangan PkM di UMMagelang adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di UMMagelang agar terbentuk sivitas akademika yang memiliki kompetensi terutama dalam bidang PkM.
2. Meningkatkan kegiatan PkM sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan yang dibina oleh LP3M, program studi, dan lintas program studi atau lintas disiplin ilmu.
3. Meningkatkan mutu PkM secara berkelanjutan melalui program PkM unggulan universitas dengan mekanisme yang mengacu pada kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan publikasi hasil PkM dosen dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional.
5. Meningkatkan perolehan KI, baik nasional maupun internasional.

### 2.4. Strategi

Strategi pembinaan dan pengembangan PkM di UMMagelang adalah:

1. Merumuskan Renstra PkM sebagai panduan arah pembinaan dan pengembangan PkM di UMMagelang.

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:. 13 Januari 2018	Hal 3 dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------

2. Meningkatkan kompetensi sivitas akademika melalui pelatihan dan pembinaan dalam berbagai kegiatan terkait PkM.
3. Membangun rekam jejak (*track record*) dan kompetensi inti (*core competency*) dosen pelaksana PkM dengan karya-karya ilmiah yang dilakukan secara konsisten pada bidang-bidang keilmuan yang ditekuninya.
4. Memperkuat peran, fungsi, dan kinerja LP3M sebagai pilar utama dalam pengembangan fungsi PkM sebagai salah satu tonggak Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Mendorong kerjasama antar lembaga terkait, lembaga pemerintah maupun swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah.
7. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk memperoleh HAKI, baik nasional maupun internasional.
8. Membangun iklim PkM yang kondusif, kompetitif, progresif dan inovatif berlandaskan kejujuran, keadilan dan keterbukaan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM di lingkungan UMMagelang.
9. Membangun atmosfer akademik dengan mengintegrasikan kegiatan PkM ke dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran.
10. Mensinergikan antara kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen dengan kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam satu kegiatan PkM terpadu.

## BAB 3. STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

### 3.1. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan PkM UMMagelang mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pedoman SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ruang lingkup dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Standar hasil PkM

##### UMMGL/SPMI/STD/06.01.01 (Standar luaran PkM)

Dosen wajib menghasilkan luaran PkM dalam rangka menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa minimal 1 (satu) luaran per tahun dalam bentuk:

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat atau mitra yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan omset, peningkatan kualitas produk, peningkatan keahlian tenaga kerja, peningkatan wirausaha baru, peningkatan manajemen, atau peningkatan pengetahuan, dan
- b. Artikel PkM atau buku ber ISBN setiap tahun.

#### 2. Standar isi PkM

##### UMM/SPMI/STD/06.02.01 (Standar kedalaman dan keluasan materi PkM)

Dosen wajib melaksanakan PkM yang berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat atau mitra yang bersumber dari hasil penelitian, pemikiran, produk pembelajaran, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 1 (satu) kegiatan pengabdian per tahun.

#### 3. Standar proses PkM

##### UMMGL/SPMI/STD/06.03.01 (Standar proses PkM)

Dosen wajib melaksanakan PkM yang berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat atau mitra yang terarah, terukur, dan terprogram dengan tahapan perencanaan (proposal), pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut.

#### 4. Standar penilaian PkM

##### UMMGL/SPMI/STD-06.04.01 (Standar penilaian proposal PkM)

LP3M wajib melakukan penilaian terhadap seluruh proposal PkM yang diajukan oleh pelaksana secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan instrumen yang minimal mencakup:

- a. kesesuaian dengan pedoman,
- b. kelayakan mitra pengabdian berdasarkan analisis situasi,
- c. kesesuaian metode dan jadwal pelaksanaan,
- d. rencana anggaran, dan
- e. kelayakan pelaksana pengabdian.

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal 5 dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------

#### **UMMGL/SPMI/STD-06.04.02 (Standar penilaian pelaksanaan PkM/monevin)**

LP3M wajib melakukan penilaian terhadap seluruh pelaksanaan PkM (monevin) secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan instrumen yang minimal mencakup:

- a. kesesuaian pelaksanaan terhadap rencana,
- b. kemanfaatan yang diperoleh oleh mitra/masyarakat,
- c. kesesuaian hasil yang dicapai terhadap yang dijanjikan,
- d. kekompakan SDM, dan
- e. keterserapan anggaran.

#### **UMMGL/SPMI/STD/06.04.03 (Standar penilaian luaran PkM)**

LP3M wajib melakukan penilaian terhadap seluruh luaran PkM secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan instrumen yang minimal mencakup:

- a. kemanfaatan yang diperoleh oleh mitra/masyarakat,
- b. kelengkapan unsur luaran, dan
- c. level penyajian luaran PkM (lokal, nasional, internasional).

### **5. Standar pelaksana PkM**

#### **UMMGL/SPMI/STD/06.05.01 (Standar pelaksana PkM)**

Dosen wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM, yang setara minimal S2 dengan rekam jejak PkM yang baik.

### **6. Standar sarana dan prasarana PkM**

#### **UMMGL/SPMI/STD/06.06.01 (Standar sarana dan prasarana PkM)**

Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksanaan kegiatan, masyarakat, dan lingkungan yang dapat diakses setiap saat pada jam kerja.

### **7. Standar pengelolaan PkM**

#### **UMMGL/SPMI/STD/06.07.01 (Standar dokumen pengelolaan PkM)**

Universitas wajib memiliki dan mengembangkan dokumen pengelolaan PkM yang lengkap dan dipublikasikan yang mencakup aspek-aspek:

- a. Renstra PkM yang mencakup arah dan fokus, jenis dan rekam jejak PkM unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, target luaran, dan sistem kompetisi yang ditinjau maksimal 5 tahun sekali.
- b. Rencana dan pelaksanaan PkM yang minimal mencakup agenda tahunan yang ditinjau setiap tahun.
- c. Pedoman pengusulan proposal PkM yang ditinjau setiap tahun.
- d. SOP PkM yang mencakup seluruh aspek kegiatan dan penjaminan mutu PkM yang ditinjau setiap tahun.

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:. 13 Januari 2018	Hal 6 dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------

- e. Penanganan plagiarasi, paten dan hak kekayaan intelektual yang ditinjau maksimal 5 tahun sekali.

**UMMGL/SPMI/STD/06.07.02 (Standar fasilitas pengelolaan PkM)**

LP3M wajib memiliki fasilitas sarana pengelolaan PkM yang mencakup aspek-aspek:

- a. Ruang kerja yang representatif minimal mencakup ruangan pejabat struktural, ruangan staff, dan ruang rapat.
- b. Perlengkapan kantor minimal mencakup ruang arsip, mebelair, telepon, serta komputer dan perangkatnya.
- c. Sistem informasi minimal mencakup website, alamat surel, dan SIM penelitian dan PkM.
- d. Perangkat pendeteksi plagiat yang mampu mendeteksi similarity dari sumber internet yang minimal berkualifikasi premium (*subscription account*).

**UMMGL/SPMI/STD/06.07.03 (Standar tindak lanjut PkM)**

LP3M wajib memiliki fasilitas untuk menindaklanjuti hasil PkM yang mencakup aspek-aspek:

- a. Unit yang mengurus KI yang minimal memiliki *drafter* paten dan ahli pembuat dokumen administrasi KI.
- b. Jurnal-jurnal ilmiah keilmuan minimal 50% terakreditasi dan 100% terindeks dalam DOAJ.
- c. Divisi penerbitan yang minimal memfasilitasi pengurusan ISBN dan penerbitan buku.
- d. Forum desiminasi hasil PkM yang menyelenggarakan seminar nasional minimal sekali dalam satu semester.

**UMMGL/SPMI/STD/06.07.04 (Standar reviewer PkM)**

LP3M wajib memiliki dan mengembangkan kapasitas reviewer PkM yang bersertifikat nasional minimal 4 orang.

**UMMGL/SPMI/STD/06.07.05 (Standar kinerja pengelolaan PkM)**

LP3M wajib meningkatkan kinerja PkM universitas sampai pada peringkat “*excellent*” maksimal 2 periode penilaian dari peringkat “*very good*”

**UMMGL/SPMI/STD/06.07.06 (Standar laporan kinerja PkM)**

LP3M wajib melaporkan kinerja dalam bentuk laporan kinerja lembaga dan laporan kinerja PkM kepada kemenristekdikti melalui simlitabmas/PD-DIKTI dan laporan kinerja unit kepada Rektor minimal satu tahun sekali dan maksimal sehari sebelum batas waktu yang ditentukan.

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: : 13 Januari 2018	Hal 7 dari 39
-------------------------------------	--	----------------	--------------------------------------	---------------

## **8. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM**

### **UMMGL/SPMI/STD/06.08.01 (Standar Biaya Pengelolaan PkM)**

Universitas wajib mengalokasikan biaya pengelolaan PkM yang dianggarkan melalui RAB LP3M dalam rangka pencapaian kinerja PkM minimal untuk membiayai manajemen PkM (perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil PkM), peningkatan kapasitas pelaksana dan insentif luaran PkM.

### **UMMGL/SPMI/STD/06.08.02 (Standar Dana PkM)**

Universitas wajib mengalokasikan dana PkM untuk dosen dalam rangka pencapaian kinerja PkM, yang mencakup:

- a. Dana PkM dengan jumlah minimal 1/3 paket pendanaan dari jumlah dosen tetap aktif per tahun akademik.
- b. Dana pendamping minimal sama dengan yang dipersyaratkan oleh pemberi dana eksternal.

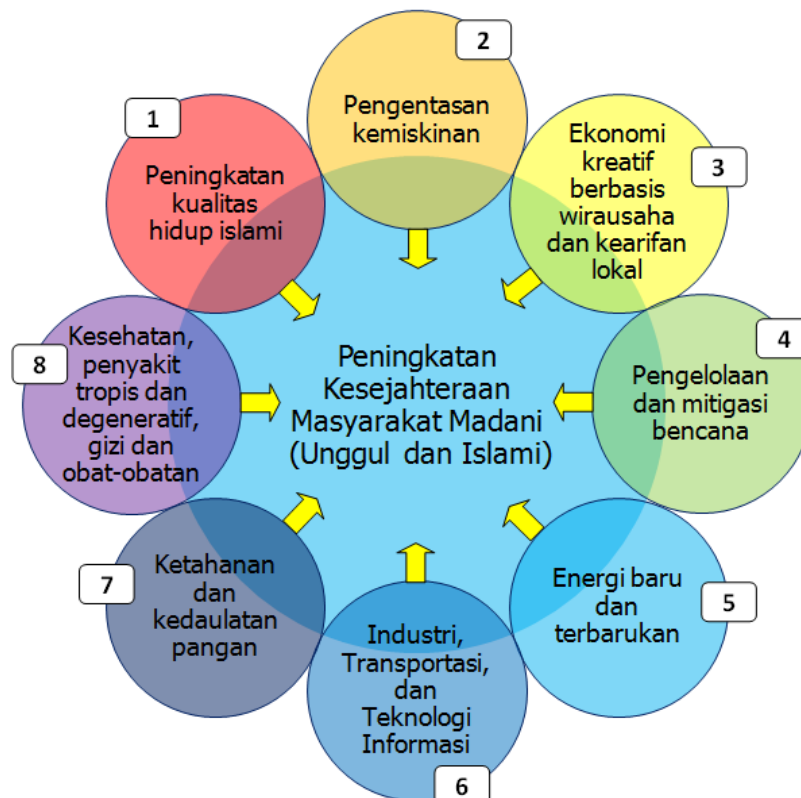
No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal 8 dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------

## BAB 4. BIDANG FOKUS PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

PkM di UMMagelang diorientasikan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Madani, dengan 8 topik bidang PkM unggulan sesuai Renstra UMMagelang 2016-2020 yaitu:

1. Peningkatan kualitas hidup islami (*improved quality of life Islamic*),
2. Pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*),
3. Ekonomi kreatif berbasis wirausaha dan kearifan lokal (*creative economy based on entrepreneurs and local wisdom*),
4. Pengelolaan dan mitigasi bencana (*disaster mitigation and management*),
5. Energi baru dan terbarukan (*new and renewable energy*),
6. Industri, transportasi, dan teknologi informasi (*industry, transportation, and information technology*),
7. Ketahanan dan kedaulatan pangan (*food security and sovereignty*),
8. Kesehatan, penyakit tropis dan degeneratif, gizi, dan obat-obatan (*health, tropical and degenerative diseases, nutrition, and medicine*),

Kaitan bidang-bidang PkM unggulan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Topik Bidang PkM Unggulan UMMagelang

#### 4.1. Peningkatan Kualitas Hidup Islami [RENSTRA-01]

<b>Masalah dan isu-isu strategis nasional</b>	
<p><b>Bidang ekonomi:</b> Sistem ekonomi kapitalis telah menimbulkan kesenjangan ekonomi dan terbentuk kelompok-kelompok ekonomi. Di sisi lain, sistem keuangan syariah dan pemberdayaan zakat yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi Islam belum sesuai yang diharapkan.</p> <p><b>Bidang hukum:</b> Dalam dekade terakhir, kejahatan korporasi dalam eksploitasi sumber daya dan ketidaktaatan terhadap hukum semakin meluas. Lemahnya penegakan hukum, pengabaian terhadap norma hukum maupun norma sosial, tidak adanya panutan dalam ketaatan hukum menjadikan degradasi moral dan penurunan tata nilai.</p> <p><b>Bidang sosial:</b> Kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan, pergaulan bebas, dan isu LGBT telah menjadi kekhawatiran masyarakat. Begitu juga merebaknya konflik sosial antar agama, suku, wilayah, kelompok ekonomi telah berpengaruh terhadap menurunnya rasa aman dalam bermasyarakat dan bernegara.</p> <p><b>Bidang pendidikan:</b> Peningkatan kasus-kasus narkoba, perkelahian antarpelajar, antarkelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Islam dan nilai luhur budaya bangsa. Demikian pula halnya dengan menurunnya kualitas pembelajaran dan pendidikan serta menurunnya mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas keseharian yang disertai dengan menurunnya kecintaan terhadap produk dalam negeri menunjukkan semakin lemahnya jati diri bangsa dalam menjunjung sifat saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong.</p> <p>Keterbukaan informasi dan pesatnya laju teknologi memang membawa banyak kemajuan, tetapi juga membuka akses yang luas ke berbagai muatan informasi yang tidak sesuai dengan karakter Islam dan karakter bangsa Indonesia. Kondisi itu ditandai dengan peningkatan kasus-kasus narkoba, perkelahian antar pelajar, antar kelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Islam dan nilai luhur budaya bangsa.</p>	
<b>Pemecahan Masalah</b>	
Kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan dengan penguatan implementasi dan internaslisasi nilai-nilai Islam ( <i>Islamic values</i> ) dan budaya bangsa ( <i>nation values</i> ) dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, dan pendidikan. Nilai-nilai Islam dan budaya bangsa yang harus ditumbuhkembangkan kembali antara lain: persaudaraan, persamaan (musawah), toleransi atau tasamuh, musyawarah, keadilan, dan keseimbangan. Masyarakat madani juga tidak terlepas dari keberhasilan pendidikan.	
<b>Topik PkM yang diperlukan</b>	
01.01	Implementasi model penguatan sistem ekonomi Islam.
01.02	Implementasi model pemberdayaan zakat individu dan zakat korporasi.
01.03	Implementasi model pemberdayaan Amal Usaha Muhammadiyah.
01.04	Implementasi hasil riset revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai persyarikatan Muhammadiyah dalam menghadapi globalisasi.
01.05	Implementasi hasil riset tentang toleransi dan inklusifitas praktek beragama.



01.06	Implementasi hasil riset tentang keterpaduan ideologi Islam dan ideologi kebangsaan dalam kehidupan sosial.
01.07	Implementasi revitalisasi budaya lokal dalam penanganan konflik sosial
01.08	Implementasi hasil riset pengembangan model peraturan dan perundangan terhadap korporasi menuju masyarakat yang berkeadilan.
01.09	Implementasi pemodelan pendidikan generasi terencana.
01.10	Implementasi penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.
01.11	Implementasi model pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan.
01.12	Implementasi pengembangan model pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan Khusus.
01.13	Implementasi peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.
01.14	Implementasi pengembangan sistem tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.
01.15	Implementasi hasil riset inovasi model pembelajaran dasar dan menengah.
01.16	Implementasi hasil riset lain terkait peningkatan kualitas hidup islami

#### 4.2. Pengentasan Kemiskinan [RENSTRA-02]

<b>Masalah dan isu-isu strategis nasional</b>	
<p>Indonesia memiliki 3 ciri yang menonjol dalam hal kemiskinan. <b>Pertama</b>, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan 1.55 dolar AS per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. <b>Kedua</b>, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong ‘miskin dari segi pendapatan’ dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. <b>Ketiga</b>, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.</p> <p>Di sisi lain, masalah kemiskinan juga antara lain akibat ketidak tepatan kebijakan pemerintah, perundang-undangan, perilaku birokrasi (struktural). Kemiskinan juga bisa bersifat sosio-kultural, diantaranya: pemahaman umat beragama tentang ajaran agamanya, lingkungan ekologis, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai sosial.</p>	
<b>Pemecahan Masalah</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi penduduk miskin.</li> <li>2. Menjadikan perlindungan sosial bermanfaat bagi penduduk miskin.</li> <li>3. Menjadikan belanja pemerintah bermanfaat bagi penduduk miskin.</li> </ol>	
<b>Topik PkM yang diperlukan</b>	
02.01	Implementasi pengembangan model sistemik pemberantasan korupsi.
02.02	Implementasi hasil rekayasa sosial berbasis pertumbuhan ekonomi.
02.03	Implementasi model perlindungan sosial.
02.04	Implementasi hasil riset pemodelan dana desa berbasis penguatan ekonomi.
02.05	Implementasi model subsidi dan kompensasi bagi masyarakat miskin.

02.06	Implementasi hasil riset penguatan kelembagaan pemberdayaan wanita.
02.07	Implementasi pemodelan akses modal bagi masyarakat marginal.
02.08	Implementasi pengembangan model KUBE
02.09	Implementasi hasil riset lain terkait penanggulangan kemiskinan.

#### 4.3. Ekonomi kreatif berbasis wirausaha & kearifan lokal [RENSTRA-03]

<b>Masalah dan isu-isu strategis nasional</b>	
<p>Sejak mulai dikembangkan secara sistematis pada tahun 2009, ekonomi kreatif saat ini mulai tumbuh dan berkembang menjadi sektor yang memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2014, ekonomi kreatif telah mampu berkontribusi sebesar 7,1% terhadap PDB nasional, menyerap tenaga kerja sekitar 12 juta orang, dan memberikan kontribusi perolehan devisa negara sebesar 5,8%. Namun demikian, pelaku industri kreatif dan tenant masih mengalami permasalahan diantaranya : ketersediaan bahan baku, keterpaduan antar industri belum optimal, standarisasi produk, dan sebagainya yang menyebabkan daya saing UMKM masih rendah.</p> <p>Di sisi lain, juga terjadi ketidakmampuan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada.</p>	
<b>Pemecahan Masalah</b>	
<p>Penguatan ekonomi kreatif berbasis wira usaha dan kearifan lokal bisa menjadi terobosan baru dalam penguatan ekonomi nasional. Indonesia memiliki potensi lokal yang sangat beragam yang belum tergal. Dalam hal ini, kebijakan dan keberpihakan pemerintah juga sangat menentukan keberhasilan sektor ekonomi kreatif.</p>	
<b>Topik PkM yang diperlukan</b>	
03.01	Implementasi hasil riset pemetaan potensi lokal untuk diindustrikan
03.02	Implementasi hasil riset peningkatan SDM untuk menghadapi MEA
03.03	Implementasi hasil riset model standarisasi produk
03.04	Implementasi hasil riset pemodelan rantai pasok bahan baku lokal
03.05	Implementasi hasil riset pemodelan keterpaduan antar UMKM
03.06	Implementasi hasil riset pemodelan dan pemberdayaan OVOP
03.07	Implementasi hasil riset model koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ekonomi kreatif
03.08	Implementasi hasil riset pemodelan ABG untuk peningkatan kualitas produk
03.09	Implementasi hasil riset pemodelan sistem integrasi sektor ekonomi kreatif dan sektor pariwisata
03.10	Implementasi hasil riset pengembangan entrepreneurship
03.11	Implementasi hasil riset lain terkait ekonomi kreatif berbasis wirausaha dan kearifan lokal

#### 4.4. Pengelolaan dan mitigasi bencana [RENSTRA-04]

<b>Masalah dan isu-isu strategis nasional dan daerah</b>	
<p>Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Indonesia telah didesain sedemikian rupa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.</p>	
<b>Pemecahan Masalah</b>	
<p>Resiko bencana dapat ditekan setiaknya dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terselenggaranya Penanggulangan Bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel ;</li><li>2. Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;</li><li>3. Terselenggaranya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu;</li><li>4. Terselenggaranya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh.</li></ol>	
<b>Topik PkM yang diperlukan</b>	
04.01	Implementasi hasil riset pengembangan kebijakan mitigasi bencana daerah
04.02	Implementasi hasil riset pengembangan model keterpaduan kelembagaan penanggulangan bencana
04.03	Implementasi hasil riset pemodelan pendanaan penanggulangan bencana yang cepat dan akuntabel
04.04	Implementasi pengembangan sistem informasi kebencanaan kepada masyarakat
04.05	Implementasi hasil riset pengembangan sistem terintegrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan daerah
04.06	Implementasi pengembangan model pendidikan mitigasi bencana
04.07	Implementasi pengembangan model pemulihan psikologi pasca bencana
04.08	Implementasi pengembangan model pemulihan ekonomi pasca bencana
04.09	Implementasi hasil riset lain terkait mitigasi dan pengelolaan bencana

#### 4.5. Energi baru dan terbarukan [RENSTRA-05]

<b>Masalah dan isu-isu strategis nasional dan daerah</b>	
<p>Dalam rangka menjamin kebutuhan energi nasional, khususnya untuk memenuhi permintaan energi dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong perubahan paradigma dari energi sebagai komoditas menjadi energi sebagai modal pembangunan. Untuk itu, pengelolaan energi harus bisa memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa permasalahan energi yang perlu mendapat perhatian, antara lain: kurang andal dan amannya infrastruktur energi,</p>	

masih tingginya ketergantungan pada energi fosil, rendah dan lambatnya pertumbuhan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), belum optimalnya pengelolaan sumber daya energi, perlunya peningkatan efisiensi dan konservasi energi termasuk diversifikasi energi, kebijakan harga energi, dan perlunya peningkatan produksi sumber energi nasional & peranan penggunaan sumber energi rendah karbon dalam mendukung pencapaian target bauran energi nasional.

#### **Pemecahan Masalah**

Untuk mendukung kebijakan nasional berupa kebijakan pengelolaan energi yang berprinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional sebagai pilar utama pembangunan energi berkelanjutan (sustainable energi system), dipandang perlu memprioritaskan riset untuk mendukung tata kelola penyediaan dan pemanfaatan energi yang baik guna mewujudkan ketahanan dan keberlanjutan energi nasional.

#### **Topik PkM yang diperlukan**

05.01	Implementasi pengembangan bahan bakar nabati dan implementasinya
05.02	Implementasi pengembangan teknologi pemanfaatan LPG, Hidrogen, dan Dimethyl Ether (DME)
05.03	Implementasi pengembangan sistem logistik dan teknologi BBG
05.04	Implementasi pengembangan material, peralatan, dan desain sistem hemat energi.
05.05	Implementasi pengembangan sistem manajemen energi pintar
05.06	Implementasi pengembangan teknologi produksi & pemanfaatan biogas
05.07	Implementasi pengembangan <i>micro power plant</i> berbasis energi terbarukan
05.08	Implementasi hasil riset lain terkait energi baru dan terbarukan

#### **4.6. Industri, transportasi, dan teknologi informasi [RENSTRA-06]**

##### **Masalah dan isu-isu strategis nasional dan daerah**

**Sektor industri :** Industri merupakan sektor penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari 3 sumber yaitu dari penggunaan energi, proses produksi, dan limbah. Industri mengkonsumsi energi hampir 50% dari seluruh total konsumsi energi final dalam tahun 2008 (Pusdatin ESDM 2008). Emisi GRK yang dihasilkan oleh industri manufaktur dari penggunaan energinya merupakan sumber terbesar ke-9 dari total emisi GRK di Indonesia.

**Sektor transportasi :** Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Transportasi juga merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan sebagai pembuka keterisolasian wilayah.

**Sektor teknologi informasi :** Saat ini, teknologi informasi dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan sektor industri, politik, pariwisata, ekonomi, pertahanan, dll dengan layanan yang cepat dan akurasi tinggi.

<b>Pemecahan Masalah</b>	
<p><i>Clean and green production</i> mampu mengurangi emisi karbon dari sektor industri. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing bangsa.</p> <p>TIK menawarkan potensi yang luar biasa dalam semua aspek. TIK mampu mendukung cara-cara baru dalam melakukan sesuatu dengan lebih produktif, efektif, efisien, aman, dan akurat.</p>	
<b>Topik PkM yang diperlukan</b>	
06.01	Implementasi <i>clean production</i> dan <i>green production</i>
06.02	Implementasi pengembangan model 6R sektor industri
06.03	Implementasi teknologi kendaraan ramah lingkungan
06.04	Implementasi pengembangan model transportasi untuk perkotaan dan daerah pelosok
06.05	Implementasi pengembangan komponen kendaraan bermotor
06.06	Implementasi pengembangan Prototipe ECU (Engine Control Unit) kendaraan bermotor
06.07	Implementasi pengembangan <i>smart city</i>
06.08	Implementasi sistem kecerdasan buatan
06.09	Implementasi hasil studi dan pemetaan teknologi sensor dan Big Data menuju Internet of Things.
06.10	Implementasi hasil studi dan pemetaan teknologi dan software/hardware pendukung terciptanya data integrated system based on sensor network.
06.11	Implementasi sistem TIK pendukung <i>e-government</i> , <i>e-health</i> , dan <i>e-bussines</i>
06.12	Implementasi teknologi untuk <i>cyber defense</i>
06.13	Implementasi hasil riset Pengembangan Smart card
06.14	Implementasi Cloud computing
06.15	Implementasi hasil riset lain terkait industri, transportasi, dan teknologi informasi

#### 4.7. Ketahanan dan kedaulatan pangan [RENSTRA-07]

<b>Masalah dan isu-isu strategis nasional dan daerah</b>
<p>Guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 250 juta, maka setiap tahun Indonesia harus menghasilkan minimal 33 juta ton beras, 16 juta ton jagung, 2,2 juta ton kedelai, 2,8 juta gula serta 484 ribu ton daging sapi. Pada tahun 2013, Indonesia telah dapat memenuhi kebutuhan untuk padi dan jagung dari produksi dalam negeri, sementara yang lain masih ada yang harus diimpor. Apabila jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 268,07 juta jiwa pada tahun 2019, maka permintaan terhadap produk pangan akan terus meningkat. Bahan pangan global diperkirakan akan terus mengalami kelangkaan sehingga harga bahan pangan pun akan terus meningkat, sehingga pengadaan pangan melalui impor juga akan semakin sulit. Penelitian menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2005 - 2050 harga biji-bijian akan meningkat sekitar 30 – 50 persen, sedangkan harga daging akan meningkat sekitar 20 - 30 persen di atas harga tahun 2007/2008. Fenomena ini dikuatirkan akan menjurus pada krisis pangan global.</p>

<b>Pemecahan Masalah</b>	
Indonesia memiliki varietas tanaman pangan yang sangat beragam untuk diversifikasi pangan maupun komoditas industri pangan fungsional. Sementara itu, teknologi mekanisasi dan IT mampu membantu menekan biaya produksi, memperkirakan cuaca, dan mitigasi perubahan iklim. Untuk itu, perlu riset bidang diversifikasi pangan, pengembangan mesin mesin pendukung pertanian dan pengolahan hasil yang sesuai dengan agroecoregion petani Indonesia, serta dukungan IT untuk mendukung ketahanan pangan	
<b>Topik PkM yang diperlukan</b>	
07.01	Implementasi inovasi alat dan mesin budidaya, pascapanen dan pengolahan, pengemasan dan distribusi hasil pertanian
07.02	Implementasi inovasi IT untuk monitoring, evaluasi, mitigasi dan adaptasi pengelolaan sumberdaya pertanian
07.03	Implementasi pembangunan sistem tata kelola rantai pasok umbi-umbian lokal untuk mengintegrasikan petani ke dalam sektor agroindustri dan perdagangan yang didukung oleh pemerintah.
07.04	Implementasi inovasi teknologi hybrid (pangan-energi)
07.05	Implementasi hasil riset lain terkait ketahanan dan kedaulatan pangan

#### 4.8. Kesehatan, penyakit tropis dan degeneratif, gizi dan obat-obatan [RENSTRA-08]

<b>Masalah dan isu-isu strategis nasional dan daerah</b>
Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah (diperkirakan 271,1 juta jiwa pada tahun 2020) diiringi dengan pergeseran pola demografi (peningkatan jumlah penduduk usia lanjut), peningkatan penyakit tidak menular (non communicable diseases) seperti stroke, jantung, diabetes, kanker dan kasus penyakit infeksi yang masih tinggi, seperti yaitu dengue, malaria, HIV/AIDS dan penyakit infeksi baru. Di sisi lain, Angka Kematian Ibu (AKI) cenderung mengalami peningkatan. Kemandirian dan daya saing Industri kesehatan nasional (Industri farmasi, industri obat herbal, industri alat kesehatan dan in vitro diagnostic) sebagai penopang penyediaan produk dan sarana pelayanan kesehatan yang masih rendah. Ketergantungan bahan baku dan teknologi pada negara lain menjadi tantangan serius yang perlu disolusikan dengan tepat. Sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang masih perlu ditingkatkan baik dalam aspek mutu maupun kecukupan jumlah. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dengan dukungan payung hukum, norma dan etika profesi yang kuat untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik masih perlu mendapatkan perhatian serius. Industri kesehatan merupakan industri yang bersifat padat modal, padat teknologi dan regulasi yang sangat ketat. Upaya-upaya untuk melakukan penguasaan iptek dan meningkatkan daya saing industri kesehatan nasional belum mendapat dukungan yang kuat. Kegiatan riset dan inovasi bidang kesehatan belum terlaksana dengan serius dan berkelanjutan.
<b>Pemecahan Masalah</b>
Mengacu pada tantangan dan beberapa isu pokok di atas, riset bidang kesehatan dan obat diarahkan pada upaya untuk penguatan deteksi dan pengendalian penyakit menular (demam berdarah, malaria, HIV-AIDS, penyakit akibat virus lainnya), penguatan deteksi, diagnosis dan pengobatan penyakit tidak menular yang menjadi

penyebab utama kematian (stroke, kardiovaskular, penyakit paru obstruktif kronik), penyakit akibat cedera, mendorong terbangunnya industri bahan baku obat dan alat kesehatan, serta pemanfaatan sumberdaya alam sebagai sumber bahan baku obat.

**Topik PkM yang diperlukan**

08.01	Implementasi pengembangan model asuhan keperawatan
08.02	Implementasi pengembangan model manajemen keperawatan.
08.03	Implementasi pengembangan model keperawatan bio-molekuler
08.04	Implementasi pengembangan model non-farmaka & terapi komplementer
08.05	Implementasi pengembangan teknologi pendukung keperawatan
08.06	Implementasi hasil riset untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)
08.07	Implementasi pengembangan bahan baku obat
08.08	Implementasi pengembangan jamu dan farmasi herbal
08.09	Implementasi pengembangan teknologi pengobatan dan & keperawatan modern
08.10	Implementasi pengembangan metode penyembuhan
08.11	Implementasi hasil riset lain terkait kesehatan, penyakit tropis dan degeneratif, gizi dan obat-obatan

Kegiatan PkM bisa dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Difusi hasil-hasil penelitian dan produk pembelajaran.
2. Berdasar pada permintaan/ kebutuhan masyarakat, yang disesuaikan dengan Renstra PkM UMMagelang.

## BAB 5. SKIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat UMMagelang tahun akademik 2019/2020 difokuskan pada revitalisasi visi institusi yang telah dijabarkan dalam Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun ini akan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan KKN mahasiswa yang selanjutnya disebut sebagai kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT).

### 5.1. Pendahuluan

PPMT diarahkan untuk mendorong dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan KKN mahasiswa. Dosen dan mahasiswa tidak hanya sebagai pelaksana pengabdian, namun sekaligus sebagai **subyek dakwah** ilmu pengetahuan dan persyarikatan. Oleh karena itu, pelaksanaan PPMT berupa pemberdayaan (*empowerment*) bukan sekedar penyuluhan.

Mitra dalam PPMT ini dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok masyarakat produktif seperti industri mikro atau kecil dan kelompok masyarakat non produktif seperti dasa wisma, PKK, karang taruna, kelompok tani, atau sekolah, diutamakan amal usaha milik Muhammadiyah atau 'Aisyiah.

### 5.2. Tujuan

Tujuan kegiatan PPMT adalah:

Tujuan kegiatan PPMT secara umum adalah untuk 1) mengoptimalkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang terintegrasi antara dosen dengan mahasiswa, 2) memperluas wilayah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga secara tidak langsung membantu mempromosikan keberadaan lembaga, dan 3) mengoptimalkan capaian luaran kegiatan yang mendukung kinerja pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuan secara khusus adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Dosen

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan masing-masing dosen.
- b. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen.
- c. Mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dosen kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian.

#### 2. Bagi Mahasiswa

- a. Mengintegrasikan kemampuan akademik dan *interpersonal education* mahasiswa melalui interaksi antara sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat.
- b. Meningkatkan wawasan, kepekaan, empati, sikap, dan perilaku sosial mahasiswa melalui pengalaman bekerja bersama dosen dan masyarakat sesuai dengan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi,

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:. 13 Januari 2018	Hal 18 dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------



- c. Membantu mahasiswa untuk mempercepat studi melalui penemuan permasalahan di masyarakat secara dini dan mandiri untuk dibantu penyelesaiannya melalui kegiatan pengabdian.

### 5.3. Luaran

Luaran wajib dari PPMT adalah publikasi dalam prosiding seminar nasional pengabdian kepada masyarakat atau jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN, media massa, dan video kegiatan yang diunggah di media sosial.

Selain itu, PPMT diharapkan juga menghasilkan luaran tambahan berupa:

1. peningkatan kuantitas dan kualitas produk;
2. peningkatan pemahaman dan ketrampilan mitra;
3. peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi;
4. peningkatan ketentraman/kesehatan masyarakat (mitra kelompok masyarakat non produktif);
5. jasa, metode, model, sistem, produk/barang.

### 5.4. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan PPMT adalah:

1. Tim pelaksana adalah kelompok mahasiswa yang sudah mengisi KRS untuk mata kuliah KKN dan 1 orang dosen yang tidak sedang menempuh studi lanjut atau yang sedang menerima hibah pengabdian kepada masyarakat *multiyears* dari Kemenristekdikti sebagai ketua maupun sumber pendanaan yang lain;
2. Setiap dosen maksimal berkolaborasi dengan 4 kelompok mahasiswa PPMT.
3. Anggota kelompok mahasiswa berjumlah 4-5 orang. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama.
4. Program ini tidak berlaku bagi tim dosen yang belum menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menyerahkan tanggungan ke LP3M pada tahun-tahun sebelumnya;
5. Topik PPMT diwajibkan mengacu pada renstra pengabdian kepada masyarakat UMMagelang 2016-2020; dan
6. Jangka waktu pelaksanaan PPMT setara dengan 150 jam per kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta tindak lanjut.

### 5.5. Sistematika Usulan PPMT

Usulan PPMT maksimum berjumlah 10 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal 19 dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

**HALAMAN SAMPUL** (Lampiran 1)

**HALAMAN PENGESAHAN** (Lampiran 2)

**DAFTAR ISI**

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Analisis Situasi**

Uraikan latar belakang disusunnya proposal PPMT dengan mengungkap identitas mitra dan permasalahan yang dihadapi secara menyeluruh. Kemudian dipilih salah satu masalah yang harus segera dibantu penyelesaiannya.

### **1.2. Luaran Kegiatan**

Luaran kegiatan PPMT terdiri dari luaran wajib yang meliputi:

- a. Laporan akhir,
- b. Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam prosiding seminar nasional pengabdian kepada masyarakat atau jurnal pengabdian kepada masyarakat ber-ISSN (nama dosen ditulis sebagai penulis pertama),
- c. Publikasi kegiatan di media massa cetak atau *online*,
- d. Video kegiatan yang dipublikasi di media sosial, dan atau
- e. Produk program (misal alat/perkakas, desain, piranti lunak, model, jasa dan lainnya).

### **1.3. Manfaat Kegiatan**

- a. Potensi sosial dan ekonomi

Uraikan manfaat ekonomi yang diharapkan dari kegiatan yang dilakukan baik dari sisi pandang bisnis (jika kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat produktif) dan sisi pandang kehidupan sosial ekonomi masyarakat sasaran (jika kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat).

- b. Nilai tambah dari sisi IPTEKS

Uraikan keunggulan teknis ataupun fungsional hasil kegiatan PPMT terhadap kondisi sebelumnya.

- c. Dampak manfaat

Uraikan kemungkinan adanya dampak positif terhadap masyarakat atau industri yang lebih luas dari hasil kegiatan PPMT.

- d. Nilai tambah bagi UMMagelang

Jelaskan nilai tambah yang diperoleh UMMagelang terhadap pelaksanaan PPMT ini.

## **BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN**

Uraikan secara kuantitatif jumlah, profil, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan PPMT. Uraikan pula kondisi dan potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang relevan dengan

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal 20 dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

kegiatan yang akan dilakukan. Hindari adanya kegiatan penelitian atau kegiatan survei dalam proposal PPMT.

## **BAB 3. METODE PELAKSANAAN**

### **3.1. Lokasi Kegiatan**

- a. Jika mitra berupa kelompok masyarakat produktif seperti industri rumah tangga atau industri kecil, maka disebutkan nama industri dan alamat.
- b. Jika mitra berupa kelompok masyarakat non produktif seperti dasa wisma, PKK, karang taruna, kelompok tani, atau sekolah, maka disebutkan nama kelompok dan alamat.

### **3.2. Metode Penyelesaian Masalah**

Metode penyelesaian masalah dapat berupa pelatihan, pendampingan, demplot, konsultasi, rekayasa sosial, dan lain-lain. Masing-masing metode penyelesaian yang dipilih, diuraikan jenis, frekuensi, dan tujuannya. Misalnya program PPMT untuk mewujudkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kampung Tegalarum dengan metode penyelesaian berupa:

#### a. Pelatihan

##### 1) Pelatihan pengolahan pupuk organik

Pelatihan ini dilakukan selama 6 jam yang diwujudkan dalam 3 pertemuan, dengan tujuan untuk memanfaatkan sampah rumah tangga yang bersifat organik menjadi pupuk yang akan digunakan untuk budidaya tanaman hortikultura.

##### 2) Pelatihan budidaya tanaman hortikultura

##### 3) Pelatihan pengolahan pangan hasil budidaya

#### b. Pendampingan

Pendampingan dilakukan dalam mempersiapkan lahan dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk membuat KRPL. Pendampingan dilaksanakan selama 24 jam yang diwujudkan dalam 8 kali pendampingan.

### **3.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Tahapan pelaksanaan kegiatan dibuat dalam bentuk *flowchart* atau tabel yang meliputi kegiatan:

- a. Perencanaan (20-30 jam)
- b. Pelaksanaan (60-70 jam)
- c. Pelaporan dan tindak lanjut (50-70 jam)

Total dari kegiatan tersebut adalah 150-160 jam (setara dengan 3 sks).

## **BAB 4. JADWAL DAN BIAYA PELAKSANAAN**

### **4.1. Jadwal PPMT**

Jadwal PPMT disusun dalam bentuk tabel yang menggambarkan tahapan kegiatan dan waktu pelaksanaan. Tahapan kegiatan PPMT harus akuntabel terhadap

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:. 13 Januari 2018	Hal 21 dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

metode pelaksanaan dalam upaya pencapaian luaran. Contoh jadwal PPMT disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Jadwal PPMT

No	Kegiatan	Bulan			
		ke 1	ke 2	ke 3	ke 4
1.	Perencanaan (20-30 jam)				
	a. Penyiapan proposal				
	b. Pengurusan perijinan				
	c. Pembekalan				
2.	Pelaksanaan (60-70 jam)				
	a. Sosialisasi kepada mitra				
	b. Pelatihan-pelatihan				
	c. Pendampingan				
3.	Pelaporan dan tindak lanjut (50-70 jam)				
	a. Penyusunan laporan				
	b. Penyusunan artikel ilmiah				
	c. Pembuatan video				
	d. Presentasi hasil				

#### 4.2. Anggaran biaya

Penyusunan anggaran biaya berdasarkan pada metode dan jadwal PPMT. Setiap kegiatan dapat dianggarkan belanja bahan, belanja non operasional, dan biaya perjalanan antara Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000. Seluruh biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh mahasiswa, kecuali honorarium dosen pendamping dibayar oleh Universitas sebesar Rp. 200.000 per mahasiswa, dan setiap mahasiswa berkontribusi sebesar Rp. 350.000 ke Universitas untuk pengelolaan PPMT yang meliputi penerbitan dokumen, administrasi, diseminasi hasil, dan monev (contoh RAB terlampir). Contoh rencana anggaran PPMT disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2. Rancangan Anggaran Belanja PPMT

Kegiatan A: Perencanaan				
Jenis	Pembelanjaan	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
Bahan	Bahan A1			
	Bahan A2			
	Dst			
Peralatan	Peralatan A1			
	Peralatan A2			
	Dst			
Transport	Biaya transport A1			
	Biaya transport A2			
	Dst			
<b>Sub total kegiatan A</b>				

Kegiatan B: Pelaksanaan				
Jenis	Pembelanjaan	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
Bahan	Bahan B1			
	Bahan B2			
	Dst			
Peralatan	Peralatan B1			
	Peralatan B2			
	Dst			
Transport	Biaya transport B1			
	Biaya transport B2			
	Dst			
<b>Sub total kegiatan B</b>				
<b>Kegiatan C: Pelaporan</b>				
<b>Kegiatan D: Tindak Lanjut</b>				
<b>Total usulan biaya (A+B+C+D)= Rp.....</b>				

NB: setiap kegiatan pengabdian tidak harus berisi lengkap (bahan, alat, dan transport), boleh hanya 1 atau 2 jenis biaya saja.

## REFERENSI

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan PPMT yang dicantumkan dalam referensi. Penulisan sitasi dan referensi **wajib** menggunakan *reference management* terutama **Mendeley**. Sitasi dan daftar referensi menggunakan gaya *American Psychological Association (APA)*.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Susunan organisasi dan pembagian tugas tim pelaksana (Lampiran 3)

Persetujuan Pemilik Wilayah (misal Kadus/Kades) (format bebas)

Kesediaan Mitra untuk Didampingi (format bebas)

Peta Lokasi dari Kampus UMM (format bebas)

## BAB 6. PENGELOLAAN PPMT

### 6.1. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal dilakukan setahun dua kali dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Topik PPMT merupakan kesepakatan antara dosen dengan kelompok mahasiswa. Selanjutnya dibuat proposal sesuai dengan format yang telah ditentukan dan disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 2 MB, diberi nama NamaKetuaPelaksana\_PPMT\_NamaProdi.pdf. (Ketua pelaksana adalah dosen dan kelompok mahasiswa merupakan anggota).
2. Tahap 1, proposal disubmit melalui <http://dosen.ummgl.ac.id/>, ditandatangani ketua pelaksana (tanpa ditandatangani Dekan dan ketua LP3M).
3. LP3M melakukan seleksi administrasi, proposal yang lolos administrasi akan diteruskan ke reviewer untuk diperiksa kelayakan isi dan anggarannya.
4. Hasil review dikirim ke pengusul.
5. Pengusul melakukan perbaikan proposal sesuai saran reviewer, dengan menyertakan tanggapan review pada bagian akhir proposal.
6. Tahap 2, proposal disubmit kembali melalui <http://dosen.ummgl.ac.id/>, ditandatangani ketua pelaksana, Ketua Program Studi/Dekan, dan Ketua LP3M.
7. Proposal yang disubmit tahap 2 (disetujui) harus melampirkan tanggapan atau perbaikan terhadap pertanyaan dan atau saran dari reviewer. (Lampiran 4).

### 6.2. Review Proposal

Tim reviewer proposal ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor atas usul Ketua LP3M. Reviewer proposal PPMT harus memenuhi kriteria berikut:

1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
2. Berpengalaman dalam bidang PkM, sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua PkM berskala nasional atau internasional;
3. Ahli di bidang PkM yang diusulkan;
4. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal nasional, internasional, atau nasional terakreditasi sebagai *first author* atau *corresponding author*;
5. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.
6. Tidak boleh mereview proposal yang diajukan sendiri.

### 6.3. Pengumuman Hasil Seleksi Proposal

Setelah proses seleksi selesai, LP3M UMMagelang mengumumkan hasil seleksi. Hasil seleksi diinformasikan kepada pelaksana PPMT melalui website LP3M.

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:. 13 Januari 2018	Hal 24 dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

#### 6.4. Kontrak

Kontrak antara LP3M dan pelaksana pengabdian segera dilaksanakan maksimal 2 minggu setelah pengumuman lolos seleksi. Penandatanganan kontrak akan dilaksanakan secara serempak, dengan jadwal tentatif.

#### 6.5. Penugasan

Penugasan pelaksanaan PPMT diterbitkan LP3M bersamaan dengan penandatanganan kontrak. Surat tugas diterbitkan per judul PPMT, dan digandakan sesuai jumlah tim.

#### 6.6. Pendanaan

Dana PPMT akan dibayarkan tunai sebesar Rp200.000 per mahasiswa yang menjadi anggota tim.

#### 6.7. Pelaksanaan

Jadwal kegiatan (tentatif)

1. Sosialisasi pedoman : 4 Desember 2019
2. Pengajuan proposal secara daring : 2-16 Januari 2020
3. Review proposal : 17-22 Januari 2020
4. Revisi : 23-26 Januari 2020
5. Pengumuman hasil seleksi : 27 Januari 2020
6. Penandatanganan Kontrak dan Surat Tugas : 28 Januari 2020
7. Pencairan dana 70% (termin 1) : 29 Januari 2020
8. Pelaksanaan kegiatan PPMT : 31 Januari-26 April 2020
9. Monev : 16-21 Maret 2020
10. Tindak lanjut hasil penelitian (pendampingan penyusunan artikel dan deskripsi KI) : 23-28 Maret 2020
11. Pencairan dana 30% (termin 2) : 30 Maret 2020
12. Laporan Akhir : 27-31 April 2020
13. Seminar Hasil : 1-2 Mei 2020

#### 6.8. Monitoring dan Evaluasi

LP3M akan melaksanakan monitoring dan evaluasi internal selama kegiatan. Pelaksana monitoring dan evaluasi terdiri dari Pejabat Struktural di LP3M dan reviewer internal yang ditunjuk dan ditugaskan oleh LP3M.

Monitoring dan evaluasi internal terdiri dari dua kegiatan yaitu kunjungan ke lapangan dan pemeriksaan administrasi. Borang monitoring evaluasi internal (administrasi dan substansi) dapat dilihat pada lampiran 5.

Kewajiban dan hak LP3M:

1. Wajib menerbitkan jadwal monitoring evaluasi internal minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan monitoring evaluasi.
2. Wajib memfasilitasi kegiatan monitoring evaluasi internal.

3. Berhak menerima, memberikan rekomendasi, atau menolak laporan dari pelaksana PPMT.

Kewajiban dan hak pelaksana PPMT:

1. Wajib mengikuti kegiatan monitoring evaluasi internal.
2. Wajib membawa bukti (*eviden*) yang diperlukan saat monitoring evaluasi internal, antara lain:
  - a. *Logbook*
  - b. Laporan kemajuan
  - c. Status luaran yang akan dicapai
  - d. Bukti-bukti penggunaan dana
  - e. Foto-foto kegiatan
3. Berhak mendapatkan fasilitasi kegiatan dan memperoleh arahan rencana tindak lanjut dari LP3M dan reviewer.
4. Berhak menerima berita acara monitoring evaluasi internal secara transparan.

### 6.9. Laporan Akhir

Laporan akhir kegiatan PPMT disusun setelah pelaksanaan monevin. Format laporan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan PPMT yang diterbitkan LP3M UMMagelang. Pelaksana PPMT wajib mengunggah laporan akhir melalui <http://dosen.ummg.ac.id/> beserta dokumen-dokumen pendukungnya (laporan keuangan, catatan harian, dan target luaran).

### 6.10. Surat Keterangan

LP3M menerbitkan surat keterangan **selesai** melaksanakan kegiatan PPMT setelah pelaksana menyelesaikan seluruh administrasi ke LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang, atau menerbitkan surat keterangan **tidak selesai** melaksanakan kegiatan PPMT jika pelaksana tidak mampu menyelesaikan seluruh administrasi ke LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang.



## **BAB 7. PENUTUP**

Pedoman ini dibuat untuk dapat digunakan oleh seluruh civitas akademika UMMagelang dalam melaksanakan kegiatan PPMT tahun akademik 2019/2020 dengan dana internal. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua LP3M UMMagelang.

No.Dokumen: Form/STD/06.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal 27 dari 39
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------



PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SKEMA PENDANAAN:  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TERPADU (PPMT)  
JUDUL .....

Bidang Prioritas Renstra pengabdian:  
RENSTRA-02: Pengentasan kemiskinan (contoh)  
Topik PPMT:  
02.07: Implementasi pemodelan akses modal bagi masyarakat marginal

Pengusul :

- |         |              |            |
|---------|--------------|------------|
| 1. Nama | NIP/NIS..... | Prodi..... |
| 2. Nama | NPM.....     | Prodi..... |
| 3. Nama | NPM.....     | Prodi..... |

Dokumen ini merupakan bukti kinerja pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu PkM  
Universitas Muhammadiyah Magelang

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Standar hasil             | <input type="checkbox"/> Standar pelaksana            |
| <input type="checkbox"/> Standar isi               | <input type="checkbox"/> Standar sarana dan prasarana |
| <input checked="" type="checkbox"/> Standar proses | <input type="checkbox"/> Standar pengelolaan          |
| <input type="checkbox"/> Standar penilaian         | <input type="checkbox"/> Standar pembiayaan           |

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
**Tahun 2019**

Lampiran 2. Halaman Pengesahan PPMT

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PPMT

1. a. Judul PPMT :  
b. Bidang RENSTRA :  
c. Topik RENSTRA :
  2. Ketua pelaksana  
a. Nama lengkap dan gelar :  
b. URL Sinta :  
c. Jenis kelamin :  
d. Golongan/Pangkat/NIP/NIS :  
e. Jabatan fungsional :  
f. Fakultas/program studi :
  3. Alamat ketua pelaksana :
  4. Jumlah anggota pelaksana : .....orang
  5. Nama dan NPM anggota pelaksana : a. Nama NPM  
b. Nama NPM  
c. Dst
  6. Lokasi PPMT :
  7. Kerjasama dengan institusi lain  
a. Nama institusi :  
b. Alamat :  
c. Telpon/fak/e-mail :
  8. Lama PPMT : .....bulan
  9. Biaya yang diperlukan  
a. LP3M UMM : Rp. ....  
b. Sumber lain (sebutkan) : Rp.....
- JUMLAH : Rp.....

Mengetahui/menyetujui  
Kepala Dekan/ Kaprodi

Magelang, .....  
Ketua Pelaksana

( )  
NIK. ....

Nama  
NIDN

Mengesahkan  
Ketua LP3M

( )  
NIK.

Lampiran 3. Susunan organisasi dan pembagian tugas tim pelaksana

<b>No</b>	<b>Nama/NIDN/NPM</b>	<b>Prodi asal</b>	<b>Bidang Ilmu</b>	<b>Alokasi Waktu Per-minggu</b>	<b>Uraian Tugas</b>
1					
2					
3					
dst					

Lampiran 4. Daftar tanggapan dan perbaikan

Pertanyaan atau saran reviewer	Tanggapan atau perbaikan yang telah dilakukan

Lampiran 5. Penilaian proposal PPMT

PENILAIAN PROPOSAL PPMT

Judul Pengabdian : .....

Tim Pelaksana :

1. Ketua : .....

2. Anggota : .....orang

3. Bidang ilmu : .....

4. Lokasi pengabdian : .....

5. Biaya yang diusulkan : .....

6. Biaya yang disetujui : .....

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1.	Analisis Situasi (Kondisi Mitra saat ini, Persoalan umum yang dihadapi mitra)	25		
2.	Permasalahan prioritas Mitra dan solusi yang ditawarkan (Kecocokan permasalahan, solusi dan kompetensi tim)	20		
3.	Target Luaran (Jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan)	25		
4.	Ketepatan Metode pendekatan untuk mengatasi permasalahan, Rencana kegiatan, kontribusi partisipasi mitra	20		
5.	Biaya Pekerjaan Kelayakan Usulan Biaya	10		
		100		

Setiap kriteria diberi skor : 1 (sangat kurang), 2 (kurang), 3(cukup), 4 (baik), 5 (sangat baik)  
 Minimal nilai total lolos : 350  
 Hasil penilaian : diterima/ditolak

Catatan reviewer :

.....

Reviewer,

.....



Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat  
**Kejar Keteringgalan**